



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 88 TAHUN 2011**  
**TANGGAL 02 DESEMBER 2011**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL**  
**DI PULAU SULAWESI**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials or full name of the official who signed the document.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI PULAU SULAWESI

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Provinsi Gorontalo			
I.1.	Gorontalo	PKN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kehutanan</li><li>- Pertanian</li><li>- Perikanan</li><li>- Industri</li><li>- Pariwisata</li><li>- Permukiman</li><li>- Pendidikan</li><li>- Perdagangan dan Jasa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKN Gorontalo sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKN Gorontalo sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan jagung yang berorientasi ekspor</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKN Gorontalo sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan jagung</li><li>e. mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</li><li>f. mengembangkan PKN Gorontalo berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dan tsunami</li><li>g. mengembangkan fungsi PKN Gorontalo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>h. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian terutama jagung, perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan dan padat karya di PKN Gorontalo sebagai pusat pengembangan Kawasan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>Andalan Gorontalo, Kawasan Andalan Marisa, serta Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya</p> <p>i. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Gorontalo dengan Pelabuhan Gorontalo dan Bandar Udara Djalaludin</p> <p>j. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Gorontalo berupa Pelabuhan Gorontalo dan Bandar Udara Djalaludin</p> <p>k. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKN Gorontalo</p> <p>l. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terrestrial Wilayah Utara Pulau Sulawesi untuk melayani PKN Gorontalo</p> <p>m. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Limboto-Bulango-Bone (Gorontalo-Sulawesi Utara) dan CAT Bone</p> <p>n. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKN Gorontalo yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</p> <p>o. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKN Gorontalo yang meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</p> <p>p. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKN Gorontalo</p> <p>q. meningkatkan keterkaitan antara kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato dengan PKN Gorontalo yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan</p> <p>r. meningkatkan fungsi PKN Gorontalo sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</p> <p>s. meningkatkan fungsi PKN Gorontalo sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>t. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dan perkebunan dengan PKN Gorontalo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gorontalo serta Kawasan Andalan Marisa yang terhubung dengan Pelabuhan Gorontalo</li><li>u. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKN Gorontalo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gorontalo serta Kawasan Andalan Marisa yang terhubung dengan Pelabuhan Gorontalo dan/atau Bandar Udara Djalaludin</li><li>v. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan PKN Gorontalo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gorontalo yang terhubung dengan Pelabuhan Gorontalo</li><li>w. meningkatkan fungsi konservasi Danau Limboto</li><li>x. mengendalikan perkembangan fisik PKN Gorontalo untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>y. mengendalikan perkembangan PKN Gorontalo yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</li><li>z. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKN Gorontalo yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>aa. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>bb. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKN Gorontalo</li><li>cc. menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota dan peraturan zonasi kota</li><li>dd. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Gorontalo</li></ul>
I.2.	Isimu	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Agroindustri</li><li>- Pertanian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Isimu sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>b. mengembangkan fungsi PKW Isimu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Isimu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gorontalo</li><li>d. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Isimu dengan Pelabuhan Gorontalo dan Bandar Udara Djalaludin</li><li>e. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Isimu berupa Pelabuhan Gorontalo dan Bandar Udara Djalaludin</li><li>f. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Isimu</li><li>g. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terrestrial Wilayah Utara Pulau Sulawesi untuk melayani PKW Isimu</li><li>h. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Limboto-Bulango-Bone (Provinsi Gorontalo- Provinsi Sulawesi Utara) dan CAT Bone</li><li>i. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Isimu yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>j. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Isimu yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>k. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Isimu</li><li>l. meningkatkan fungsi PKW Isimu sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>m. mengendalikan perkembangan fisik PKW Isimu untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>n. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>o. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Isimu</li><li>p. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>q. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Isimu</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.	Kuandang	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Pertanian</li><li>– Perkebunan</li><li>– Kehutanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Kuandang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan jagung</li><li>b. mengembangkan PKW Kuandang sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan dan hasil hutan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKW Kuandang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dan tsunami</li><li>e. mengembangkan fungsi PKW Kuandang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian dan perkebunan serta komoditas hasil hutan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Kuandang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gorontalo</li><li>g. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Kuandang dengan Pelabuhan Gorontalo dan Bandar Udara Djalaludin</li><li>h. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Kuandang berupa Pelabuhan Gorontalo dan Bandar Udara Djalaludin</li><li>i. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Kuandang</li><li>j. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terrestrial Wilayah Utara Pulau Sulawesi untuk melayani PKW Kuandang</li><li>k. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Limboto-Bulango-Bone (Gorontalo-Sulawesi Utara)</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>l. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Kuandang yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>m. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Kuandang yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>n. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Kuandang</li><li>o. meningkatkan fungsi PKW Kuandang sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>p. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan PKW Kuandang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gorontalo yang terhubung dengan Pelabuhan Gorontalo dan/atau Bandar Udara Djalaludin</li><li>q. mengendalikan perkembangan fisik PKW Kuandang untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>r. mengendalikan perkembangan PKW Kuandang yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</li><li>s. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>t. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Kuandang</li><li>u. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Kuandang</li></ul>
I.4.	Tilamuta	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Agroindustri</li><li>- Pertanian</li><li>- Perikanan</li><li>- Pariwisata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Tilamuta sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan pusat pariwisata bahari dengan didukung oleh sarana dan parasana yang memadai di PKW Tilamuta Poso sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan PKW Tilamuta sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman</li><li>d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>e. mengembangkan PKW Tilamuta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi</li><li>f. mengembangkan fungsi PKW Tilamuta sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>g. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian serta perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan dan padat karya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Marisa serta Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya)</li><li>h. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Tilamuta dengan Pelabuhan Gorontalo dan Bandar Udara Djalaludin</li><li>i. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Tilamuta</li><li>j. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial Wilayah Utara Pulau Sulawesi untuk melayani PKW Tilamuta</li><li>k. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Paguyaman (Gorontalo)</li><li>l. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Tilamuta yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>m. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Tilamuta yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>n. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Tilamuta</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>o. meningkatkan fungsi PKW Tilamuta sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>p. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dan perikanan dengan PKW Tilamuta sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Marisa yang terhubung dengan Pelabuhan Gorontalo dan/atau Bandar Udara Djalaludin</li><li>q. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Tilamuta yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>r. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>s. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Tilamuta</li><li>t. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>u. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Tilamuta</li></ul>
II.	Provinsi Sulawesi Utara			
II.1.	Kawasan Perkotaan Manado-Bitung	PKN	<ul style="list-style-type: none"><li>– Perdagangan dan jasa</li><li>– Industri</li><li>– Perikanan</li><li>– Pariwisata</li><li>– Perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan hasil perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. meningkatkan jasa pelayanan keuangan, pergudangan, dan perdagangan yang mendukung kegiatan ekspor-impor</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan tangkap dan pertambangan, dan pariwisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran di PKN Kawasan Perkotaan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>Manado-Bitung sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Bunaken dan Sekitarnya</p> <p>e. mengembangkan PKN Gorontalo berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan tsunami</p> <p>f. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</p> <p>g. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perikanan tangkap dan perikanan budi daya ekspor dan komoditas perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Bunaken dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya</p> <p>h. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung dengan Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Sam Ratulangi</p> <p>i. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung berupa Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Sam Ratulangi</p> <p>j. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung</p> <p>k. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial Wilayah Utara Pulau Sulawesi untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung</p> <p>l. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Tondano-Likupan</p> <p>m. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</p> <p>n. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>o. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung</li><li>p. meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>q. meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>r. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pusat pengembangan dengan Pelabuhan Bitung</li><li>s. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Bunaken dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Sam Ratulangi</li><li>t. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pariwisata dengan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Bunaken dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Batutoli dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Bitung</li><li>u. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>v. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</li><li>w. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>x. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>y. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Manado – Bitung</li><li>z. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 11 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				aa. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Manado – Bitung
II.2.	Tomohon	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– pertanian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Tomohon sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan jagung</li><li>c. mengembangkan PKW Tomohon berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi</li><li>d. mengembangkan fungsi PKW Tomohon sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>e. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan yang ramah lingkungan dan padat karya</li><li>f. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Tomohon dengan Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Sam Ratulangi</li><li>g. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Tomohon</li><li>h. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terrestrial Wilayah Utara Pulau Sulawesi untuk melayani PKW Tomohon</li><li>i. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Tondano-Likupang</li><li>j. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Tomohon yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>k. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Tomohon yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>l. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Tomohon</li><li>m. meningkatkan fungsi PKW Tomohon sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>n. mengendalikan perkembangan fisik PKW Tomohon untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>o. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>p. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Tomohon</li><li>q. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>r. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Tomohon</li></ul>
II.3.	Tondano	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Agroindustri</li><li>- Pertanian</li><li>- Pariwisata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan (Kawasan Pinabetengan/Bukit Kasih Kanonang Minahasa)</li><li>b. mengembangkan PKW Tondano sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan pkw tondano berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi dan tsunami</li><li>e. mengembangkan fungsi PKW Tondano sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas pertanian yang ramah lingkungan dan padat karya</li><li>g. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tondano dengan Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Sam Ratulangi</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 13 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>h. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Tondano</li><li>i. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial Wilayah Utara Pulau Sulawesi untuk melayani PKW Tondano</li><li>j. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Tondano-Likupang</li><li>k. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Tondano yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>l. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Tondano yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>m. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Tondano</li><li>n. meningkatkan fungsi PKW Tondano sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>o. mengendalikan perkembangan fisik PKW Tondano untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>p. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>q. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Tondano</li><li>r. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>s. Membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Tondano</li></ul>
II.4.	Kotamobagu	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Agroindustri</li><li>- Perkebunan</li><li>- Pertanian</li><li>- perikanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Kotamobagu sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan dan perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Kotamobagu sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKW Kotamobagu sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi</li><li>e. mengembangkan PKN Gorontalo berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi</li><li>f. mengembangkan fungsi PKW Kotamobagu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>g. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Kotamobagu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu</li><li>h. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kotamobagu dengan Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Sam Ratulangi</li><li>i. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Kotamobagu</li><li>j. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terrestrial Wilayah Utara Pulau Sulawesi untuk melayani PKW Kotamobagu</li><li>k. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Dumoga-Sangkup</li><li>l. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Kotamobagu yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>m. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Kotamobagu yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>n. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Kotamobagu</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>o. meningkatkan fungsi PKW Kotamobagu sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>p. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dan perkebunan dengan PKW Kotamobagu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu yang terhubung dengan Pelabuhan Bitung</li><li>q. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Kotamobagu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu yang terhubung dengan Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Sam Ratulangi</li><li>r. mengendalikan perkembangan fisik PKW Kotamobagu untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>s. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>t. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Kotamobagu</li><li>u. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Kotamobagu</li></ul>
II.5.	Melonguane	PKSN	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pertahanan dan keamanan</li><li>– Industri</li><li>– Perdagangan dan jasa</li><li>– Perikanan</li><li>– Perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKSN Melonguane sebagai pusat kegiatan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara</li><li>b. mengembangkan PKSN Melonguane sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKSN Melonguane berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi dan tsunami</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>e. mengembangkan fungsi PKSN Melonguane sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan jaringan jalan lingkar Pulau Sangir Besar di PKSN Melonguane</li><li>g. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKSN Melonguane</li><li>h. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial Wilayah Utara Pulau Sulawesi untuk melayani PKSN Melonguane</li><li>i. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Sangihe-Talaud (Provinsi Sulawesi Utara)</li><li>j. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKSN Melonguane yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>k. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKSN Melonguane yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>l. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKSN Melonguane</li><li>m. meningkatkan fungsi PKSN Melonguane sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>n. meningkatkan fungsi PKSN Melonguane sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>o. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKSN Melonguane yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>p. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKSN Melonguane</li><li>q. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>r. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKSN Melonguane</li></ul>
II.6.	Tahuna	PKSN	– Pertahanan dan	a. mengembangkan PKSN Tahuna sebagai pusat kegiatan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 17 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>keamanan</li><li>– Industri</li><li>– Perikanan</li><li>– Perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>b. mengembangkan PKSN Tahuna sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKSN Tahuna berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi dan tsunami</li><li>e. mengembangkan fungsi PKSN Tahuna sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan jaringan jalan lingkar Pulau Karakelang di PKSN Tahuna</li><li>g. mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKSN Tahuna</li><li>h. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terrestrial Wilayah Utara Pulau Sulawesi untuk melayani PKSN Tahuna</li><li>i. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Sangihe-Talaud (Provinsi Sulawesi Utara)</li><li>j. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKSN Tahuna yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>k. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKSN Tahuna yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>l. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKSN Tahuna</li><li>m. meningkatkan fungsi PKSN Tahuna sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>n. meningkatkan fungsi PKSN Tahuna sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>o. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKSN Tahuna yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>p. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>q. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKSN Tahuna</li><li>r. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>s. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKSN Tahuna</li></ul>
III.	Provinsi Sulawesi Tengah			
III.1.	Palu	PKN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perdagangan dan jasa</li><li>- Industri</li><li>- Perkebunan</li><li>- Kelautan</li><li>- Pariwisata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKN Palu sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. meningkatkan jasa pelayanan keuangan, pergudangan, dan perdagangan yang mendukung kegiatan ekspor-impor</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKN Palu sebagai pusat pariwisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</li><li>e. mengembangkan PKN Palu berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi</li><li>f. mengembangkan fungsi PKN Palu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 19 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>g. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perkebunan kakao serta perikanan yang ramah lingkungan dan padat karya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo-Kepulauan Banggai dan Sekitarnya</p> <p>h. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Palu dengan Pelabuhan Pantoloan dan Bandar Udara Mutiara</p> <p>i. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Palu berupa Pelabuhan Pantoloan dan Bandar Udara Mutiara</p> <p>j. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKN Palu</p> <p>k. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan menghubungkan Jaringan Terrestrial: <i>Feeder</i> Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKN Palu</p> <p>l. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Palu-Lariang (Sulawesi Tengah-Sulawesi Selatan)</p> <p>m. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKN Palu yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</p> <p>n. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKN Palu yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</p> <p>o. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKN Palu</p> <p>p. mengembangkan kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso dengan PKN Palu yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan</p> <p>q. meningkatkan fungsi PKN Palu sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>r. Meningkatkan fungsi PKN Palu sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>s. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan kakao dengan PKN Palu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Pantoloan</li><li>t. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKN Palu sebagai pusat pengembangan (Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo-Kepulauan Banggai dan Sekitarnya) yang terhubung dengan Pelabuhan Pantoloan dan Bandar Udara Mutiara</li><li>u. meningkatkan fungsi konservasi Waduk Pasangkayu</li><li>v. mengendalikan perkembangan fisik PKN Palu untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>w. mengendalikan perkembangan PKN Palu yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</li><li>x. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKN Palu yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>y. mengendalikan perkembangan kawasan budidaya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>z. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKN Palu</li><li>aa. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li></ul> Membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Palu
III.2.	Poso	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Agroindustri</li><li>- Kehutanan</li><li>- Perikanan</li><li>- Perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Poso sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, dan hasil hutan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan fungsi PKW Poso sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, komoditas hasil hutan, serta komoditas unggulan perkebunan kakao yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Poso sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya</li><li>e. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Poso dengan Pelabuhan Pantoloan dan Bandar Udara Mutiara</li><li>f. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Poso</li><li>g. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial : Feeder Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW Poso</li><li>h. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Parigi-Poso (Sulawesi Tengah)</li><li>i. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di KW Poso yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>j. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Poso yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>k. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Poso</li><li>l. meningkatkan fungsi PKN Poso sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>m. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan kakao dengan PKW Poso sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Pantoloan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>n. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dengan PKW Poso sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Pantoloan dan Bandar Udara Mutiara</p> <p>o. meningkatkan fungsi konservasi Danau Poso</p> <p>p. mengendalikan perkembangan fisik PKW Poso untuk mempertahankan luas lahan pertanian</p> <p>q. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Poso yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</p> <p>r. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan perkebunan yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</p> <p>s. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Poso</p> <p>t. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</p> <p>u. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Poso</p>
III.3.	Luwuk	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pariwisata</li><li>– Industri Pengolahan Migas</li><li>– Perikanan</li></ul>	<p>a. mengembangkan PKW Luwuk sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>b. mengembangkan PKW Luwuk sebagai pusat industri pengolahan Migas</p> <p>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>d. mengembangkan PKW Luwuk berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dan tsunami</p> <p>e. mengembangkan fungsi PKW Luwuk sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 23 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perikanan industri pengolahan komoditas unggulan serta industri pengolahan Migas yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Luwuk sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo dan Kepulauan Banggai dan Sekitarnya</p> <p>g. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Luwuk dengan Bandar Udara Sukran Amir (Sukran Amir)</p> <p>h. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Luwuk berupa Bandar Udara Sukran Amir (Sukran Amir)</p> <p>i. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Luwuk</p> <p>j. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terrestrial: Feeder Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW Luwuk</p> <p>k. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Bongka-Mentawa</p> <p>l. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Luwuk yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</p> <p>m. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Luwuk yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</p> <p>n. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Luwuk</p> <p>o. mengembangkan kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PKW Luwuk yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan</p> <p>p. meningkatkan fungsi PKW Luwuk sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</p> <p>q. meningkatkan fungsi PKW Luwuk sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 24 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>r. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Luwuk sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo dan Kepulauan Banggai dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Gorontalo</li><li>s. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Luwuk yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>t. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>u. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Luwuk</li><li>v. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>w. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Luwuk</li></ul>
III.4.	Buol	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Pertanian</li><li>– Perkebunan</li><li>– Perikanan Tangkap</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Buol sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Buol sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan fungsi Buol sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>e. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perkebunan kakao serta perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Buol sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Toli-Toli dan Sekitarnya</li><li>f. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Buol dengan Pelabuhan Toli-toli</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 25 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>g. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Buol</li><li>h. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial Wilayah Utara Pulau Sulawesi untuk melayani PKW Buol</li><li>i. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Lambunu-Buol (Sulawesi Tengah)</li><li>j. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Buol yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>k. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Buol yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>l. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Buol</li><li>m. meningkatkan fungsi PKW Buol sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>n. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dan perikanan dengan PKW Buol sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Toli-Toli dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Toli-toli</li><li>o. mengendalikan perkembangan fisik PKW Buol untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>p. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Buol yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>q. mengendalikan perkembangan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>r. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Buol</li><li>s. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>t. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Buol</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 26 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.	Kolonedale	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Industri</li><li>– Pertambangan</li><li>– Perkebunan</li><li>– Pertanian</li><li>– Perikanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Kolonedale sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan, perikanan, dan perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Kolonedale sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan fungsi PKW Kolonedale sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>e. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian, perikanan, perkebunan kakao, dan pertambangan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Kolonedale sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya</li><li>f. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kolonedale dengan Bandar Udara Sukran Amir (Sukran Amir)</li><li>g. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Kolonedale</li><li>h. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Feeder Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW Kolonedale</li><li>i. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Laa-Tambalako (Sulawesi Tengah) dan CAT Wasopote</li><li>j. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Kolonedale yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>k. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Kolonedale yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 27 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>l. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Kolonedale</li><li>m. meningkatkan fungsi PKW Kolonedale sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>n. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan kakao, dan pertambangan dengan PKW Kolonedale sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya yang terhubung dengan Bandar Udara Sukran Amir (Sukran Amir)</li><li>o. mengendalikan perkembangan fisik PKW Kolonedale untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>p. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Kolonedale yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>q. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>r. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Kolonedale</li><li>s. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>t. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Kolonedale</li></ul>
III.6.	Toli-toli	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Pertanian</li><li>– Perikanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Toli-toli sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Toli-toli sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKW Toli-toli berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dan tsunami</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 28 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>e. mengembangkan fungsi PKW Toli-toli sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian terutama jagung serta perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Toli-toli sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya</li><li>g. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Toli-toli dengan Pelabuhan Toli-toli</li><li>h. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Toli-toli berupa Pelabuhan Toli-toli</li><li>i. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Toli-toli</li><li>j. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW Toli-toli</li><li>k. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Lambunu-Buol</li><li>l. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Toli-toli yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>m. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Toli-toli yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>n. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Toli-toli</li><li>o. meningkatkan fungsi PKW Toli-toli sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>p. meningkatkan fungsi PKW Toli-toli sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 29 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>q. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dengan PKW Toli-toli sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Toli-toli</li><li>r. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Toli-toli sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Toli-toli</li><li>s. mengendalikan perkembangan fisik PKW Toli-toli untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>t. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Toli-toli yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>u. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>v. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Toli-toli</li><li>w. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>x. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Toli-toli</li></ul>
III.7.	Donggala	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Pertanian</li><li>– Perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Donggala sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Donggala sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan jagung</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKW Donggala berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dan tsunami</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 30 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>e. mengembangkan fungsi PKW Donggala sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Donggala sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya</li><li>g. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Donggala dengan Pelabuhan Donggala</li><li>h. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Donggala berupa Pelabuhan Donggala</li><li>i. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Donggala</li><li>j. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW Donggala</li><li>k. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Palu-Lariang (Sulawesi Tengah-Sulawesi Selatan)</li><li>l. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Donggala yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>m. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Donggala yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>n. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Donggala</li><li>o. meningkatkan fungsi PKW Donggala sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>p. meningkatkan fungsi PKW Donggala sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 31 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>q. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dan perkebunan dengan PKW Donggala sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Donggala</p> <p>r. meningkatkan fungsi konservasi Waduk Pasangkayu</p> <p>s. mengendalikan perkembangan PKW Donggala yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>t. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Donggala yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</p> <p>u. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</p> <p>v. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Donggala</p> <p>w. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</p> <p>x. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Donggala</p>
IV.	Provinsi Sulawesi Selatan			
IV.1.	Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata)	PKN	<ul style="list-style-type: none"><li>– Perdagangan dan jasa</li><li>– Industri</li><li>– Perikanan</li><li>– Pertanian</li><li>– Pariwisata</li></ul>	<p>a. meningkatkan jasa pelayanan keuangan, pergudangan, dan perdagangan yang mendukung kegiatan ekspor-impor</p> <p>b. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan pertambangan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>c. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>e. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pariwisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 32 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>f. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir dan tsunami</p> <p>g. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa dan industri jasa komoditas unggulan pertanian pertambangan, serta perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan dan padat karya di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, Kawasan Andalan Pare-Pare dan Sekitarnya Kawasan Andalan Laut Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya</p> <p>i. mengembangkan kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara dengan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata</p> <p>j. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan Bandar Udara Sultan Hasanuddin</p> <p>k. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata berupa Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan Bandar Udara Sultan Hasanuddin</p> <p>l. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata</p> <p>m. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 33 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>n. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Jeneberang (Sulawesi Selatan)</p> <p>o. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</p> <p>p. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</p> <p>q. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata</p> <p>r. meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</p> <p>s. meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p> <p>t. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dengan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertanian terutama Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone, dan Kawasan Andalan Pare-Pare dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Makassar</p> <p>u. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya yang terhubung dengan Soekarno-Hatta (Makassar) dan/atau Bandar Udara Sultan Hasanuddin</p> <p>v. meningkatkan fungsi konservasi Waduk Bili-bili</p> <p>w. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata untuk mempertahankan luas lahan pertanian</p> <p>x. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>y. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>z. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>aa. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata</li><li>bb. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>cc. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata</li></ul>
IV.2.	Pangkajene	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Agroindustri</li><li>- Perikanan</li><li>- Pariwisata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Pangkajene sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>c. mengembangkan PKW Pangkajene sebagai pusat pariwisata bahari</li><li>d. mengembangkan PKW Pangkajene berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir</li><li>e. mengembangkan fungsi PKW Pangkajene sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perikanan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Pangkajene sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya</li><li>g. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Pangkajene dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan Bandar Udara Sultan Hasanuddin</li><li>h. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Pangkajene</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>i. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi untuk melayani PKW Pangkajene</li><li>j. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Sadang</li><li>k. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Pangkajene yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>l. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Pangkajene yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>m. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Pangkajene</li><li>n. meningkatkan fungsi PKW Pangkajene sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>o. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Pangkajene sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan/atau Bandar Udara Sultan Hasanuddin</li><li>p. mengendalikan perkembangan fisik PKW Pangkajene untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>q. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>r. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Pangkajene</li><li>s. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>t. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Pangkajene</li></ul>
IV.3.	Jeneponto	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Pertanian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Jeneponto sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Perikanan</li><li>- Pariwisata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>b. mengembangkan PKW Jeneponto sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKW Jeneponto sebagai pusat pariwisata bahari</li><li>e. mengembangkan PKW Jeneponto berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir</li><li>f. mengembangkan fungsi PKW Jeneponto sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>g. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian terutama jagung serta perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Jeneponto sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone serta Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya</li><li>h. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Jeneponto dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan Bandar Udara Sultan Hasanuddin</li><li>i. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Jeneponto</li><li>j. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi untuk melayani PKW Jeneponto</li><li>k. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Jeneberang (Sulawesi Selatan)</li><li>l. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Jeneponto yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>m. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Jeneponto yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>n. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Jeneponto</li><li>o. meningkatkan fungsi PKW Jeneponto sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>p. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dengan PKW Jeneponto sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar)</li><li>q. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Jeneponto sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan/atau Bandar Udara Sultan Hasanuddin</li><li>r. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pariwisata dengan PKW Jeneponto sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan/atau Bandar Udara Sultan Hasanuddin</li><li>s. mengendalikan perkembangan fisik PKW Jeneponto untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>t. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Jeneponto yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>u. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>v. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Jeneponto</li><li>w. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>x. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Jeneponto</li></ul>
IV.4.	Palopo	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Perkebunan</li><li>– Pertanian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Palopo sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Palopo sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKW Palopo berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dan banjir</li><li>e. mengembangkan fungsi PKW Palopo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan kakao yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Palopo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya</li><li>g. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Palopo dengan Pelabuhan Pare-pare</li><li>h. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Palopo</li><li>i. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi untuk melayani PKW Palopo</li><li>j. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Pompengan-Lorena dan WS Sadang (Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara)</li><li>k. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Palopo yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>l. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Palopo yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>m. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Palopo</li><li>n. meningkatkan fungsi PKW Palopo sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>o. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dan perkebunan dengan PKW Palopo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Palopo dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Pare-pare</li><li>p. meningkatkan fungsi konservasi Waduk Larona (Batu Besi) dan Waduk Balambano</li><li>q. mengendalikan perkembangan fisik PKW Palopo untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>r. mengendalikan perkembangan PKW Palopo yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</li><li>s. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Palopo yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>t. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>u. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Palopo</li><li>v. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>w. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Palopo</li></ul>
IV.5.	Watampone	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Pertanian</li><li>– Perikanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Watampone sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Watampone sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan fungsi PKW Watampone sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>e. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perikanan dan komoditas pertanian yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Watampone sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya</li><li>f. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Watampone dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar)</li><li>g. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Watampone</li><li>h. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi untuk melayani PKW Watampone</li><li>i. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Jeneberang (Sulawesi Selatan)</li><li>j. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Watampone yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>k. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Watampone yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>l. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Watampone</li><li>m. meningkatkan fungsi PKW Watampone sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>n. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dan perkebunan dengan PKW Watampone sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar)</li><li>o. meningkatkan fungsi konservasi Waduk Ponre-ponre dan Waduk Salomekko</li><li>p. mengendalikan perkembangan fisik PKW Watampone untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>q. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Watampone yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>r. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>s. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Watampone</li><li>t. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>u. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Watampone</li></ul>
IV.6.	Bulukumba	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Pertanian</li><li>– Pariwisata</li><li>– Perikanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Bulukumba sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>b. mengembangkan PKW Bulukumba sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>c. mengembangkan PKW Bulukumba sebagai pusat pariwisata cagar budaya (Kawasan Suku Kajang)</li><li>d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>e. mengembangkan fungsi PKW Bulukumba sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perikanan dan komoditas pertanian yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Bulukumba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Bulukumba-Wantampone</li><li>g. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Bulukumba dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar)</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>h. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Bulukumba</li><li>i. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi untuk melayani PKW Bulukumba</li><li>j. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Jeneberang (Sulawesi Selatan)</li><li>k. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Bulukumba yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>l. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Bulukumba yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>m. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Bulukumba</li><li>n. meningkatkan fungsi PKW Bulukumba sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>o. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dengan PKW Bulukumba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bulukumba-Wantampone yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar)</li><li>p. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Bulukumba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) dan/atau Bandar udara Sultan Hasanuddin</li><li>q. mengendalikan perkembangan fisik PKW Bulukumba untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>r. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Bulukumba yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>s. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>t. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Bulukumba</li><li>u. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Bulukumba</li></ul>
IV.7.	Barru	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Perikanan</li><li>– Pertanian</li><li>– Perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Barru sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Barru sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan fungsi PKW Barru sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>e. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perikanan komoditas pertanian, dan komoditas perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Barru sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar</li><li>f. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Barru dengan Pelabuhan Pare-pare</li><li>g. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Barru</li><li>h. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi untuk melayani PKW Barru</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>i. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Walanae-Cenranae (Sulawesi Selatan)</li><li>j. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Barru yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>k. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Barru yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>l. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Barru</li><li>m. meningkatkan fungsi PKW Barru sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>n. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dengan PKW Barru sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar yang terhubung dengan Pelabuhan Pare-pare</li><li>o. mengendalikan perkembangan fisik PKW Barru untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>p. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Barru yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>q. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>r. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Barru</li><li>s. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>t. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Barru</li></ul>
IV.8.	Pare-Pare	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Perikanan</li><li>– Pertanian</li><li>– Perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Pare-Pare sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Pare-Pare sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 45 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKW Pare-Pare sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan padi</li><li>e. mengembangkan fungsi PKW Pare-Pare sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perikanan komoditas pertanian, dan komoditas perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Pare-pare sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar serta Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya</li><li>g. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Pare-Pare dengan Pelabuhan Pare-pare</li><li>h. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Pare-Pare</li><li>i. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi untuk melayani PKW Pare-Pare</li><li>j. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Walanae-Cenranae (Sulawesi Selatan)</li><li>k. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Pare-Pare yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>l. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Pare-Pare yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>m. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Pare-Pare</li><li>n. meningkatkan fungsi PKSW Pare-Pare sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>o. meningkatkan fungsi PKW Pare-Pare sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>p. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dan kegiatan perkebunan dengan PKW Pare-Pare sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Pare-pare</li><li>q. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Pare-Pare sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar yang terhubung dengan Pelabuhan Pare-pare</li><li>r. mengendalikan perkembangan fisik PKW Pare-Pare untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>s. Mengendalikan perkembangan PKW Pare-Pare yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</li><li>t. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Pare-Pare yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>u. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>v. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Pare-Pare</li><li>w. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>x. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Pare-Pare</li></ul>
V.	Provinsi Sulawesi Barat			
V.1.	Mamuju	PKW	– Perdagangan dan jasa	a. mengembangkan PKW Mamuju sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan kakao yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Industri</li><li>- Pariwisata</li><li>- Perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>c. mengembangkan PKW Mamuju sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan kakao</li><li>d. mengembangkan PKW Mamuju sebagai pusat pariwisata cagar budaya (Kawasan Mamasa)</li><li>e. mengembangkan fungsi PKW Mamuju sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Mamuju sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya</li><li>g. mengembangkan kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali dengan PKW Mamuju</li><li>h. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Mamuju dengan Bandar Udara Tampa Padang dan Pelabuhan Belang-Belang</li><li>i. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Mamuju</li><li>j. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi untuk melayani PKW Mamuju</li><li>k. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Kaluku-Karama (Sulawesi Barat-Sulawesi Tengah)</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>l. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Mamuju yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>m. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Mamuju yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>n. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Mamuju</li><li>o. meningkatkan fungsi PKW Mamuju sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>p. meningkatkan fungsi PKW Mamuju sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>q. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Mamuju sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Belang-Belang</li><li>r. mengendalikan perkembangan PKW Mamuju yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</li><li>s. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Mamuju yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>t. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>u. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Mamuju</li><li>v. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>w. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Mamuju</li></ul>
V.2.	Majene	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Agroindustri</li><li>- Perikanan</li><li>- Pertanian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Majene sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Majene sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkebunan</li><li>- Pariwisata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKW Majene sebagai pusat pariwisata bahari</li><li>e. mengembangkan PKN Majene berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi</li><li>f. mengembangkan fungsi PKW Majene sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>g. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas perikanan komoditas pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Majene sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar serta Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya</li><li>h. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Majene dengan Bandar Udara Tampa Padang dan Pelabuhan Belang-Belang</li><li>i. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Majene</li><li>j. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Barat Sulawesi untuk melayani PKW Majene</li><li>k. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Kaluku-Karama (Sulawesi Barat-Sulawesi Tengah)</li><li>l. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Majene yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>m. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Majene yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>n. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Majene</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>o. meningkatkan fungsi PKW Majene sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>p. meningkatkan fungsi PKW Majene sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>q. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Majene sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar yang terhubung dengan Pelabuhan Belang-Belang</li><li>r. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dan pertanian dengan PKW Majene sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya yang terhubung dengan Pelabuhan Belang-Belang</li><li>s. mengendalikan perkembangan fisik PKW Majene untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>t. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Majene yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>u. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>v. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Majene</li><li>w. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>x. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Majene</li></ul>
V.3.	Pasangkayu	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Perkebunan</li><li>– Pertanian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Pasangkayu sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Pasangkayu sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan PKN Pasangkayu berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi</li><li>e. mengembangkan fungsi PKW Pasangkayu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas perkebunan kakao yang ramah lingkungan dan padat karya</li><li>g. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Pasangkayu dengan Pelabuhan Donggala</li><li>h. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Pasangkayu</li><li>i. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW Pasangkayu</li><li>j. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Palu-Lariang (Sulawesi Tengah-Sulawesi Selatan)</li><li>k. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Pasangkayu yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>l. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Pasangkayu yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>m. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Pasangkayu</li><li>n. meningkatkan fungsi PKW Pasangkayu sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>o. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Pasangkayu yang terhubung dengan Pelabuhan Donggala</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>p. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Pasangkayu yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</p> <p>q. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</p> <p>r. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Pasangkayu</p> <p>s. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</p> <p>t. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Pasangkayu</p>
VI.	Provinsi Sulawesi Tenggara			
VI.1.	Kendari	PKN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perdagangan dan jasa</li><li>- Pariwisata</li><li>- Industri</li><li>- Perikanan</li><li>- Pertanian</li><li>- Perkebunan</li></ul>	<p>a. mengembangkan PKN Kendari sebagai pusat pariwisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>b. mengembangkan PKN Kendari sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>c. mengembangkan PKN Kendari sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>e. mengembangkan fungsi PKN Kendari sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian serta perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Kendari sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, Kawasan Kapolimu-Patikala Muna-Buton, Kawasan Mowedong/Kolaka, Kawasan Andalan Laut Asera Lasolo, Kawasan Andalan Laut Kapontori-Lasalimu dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Tiworo dan Sekitarnya</p> <p>g. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kendari dengan Bandar Udara Wolter Mongonsidi</p> <p>h. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kendari berupa Bandar Udara Wolter Mongonsidi</p> <p>i. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKN Kendari</p> <p>j. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Pelayanan Pengumpulan (<i>Feeder</i>) Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKN Kendari</p> <p>k. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Lasolo-Sampara (Sulawesi Tenggara-Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah)</p> <p>l. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKN Kendari yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</p> <p>m. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKN Kendari yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</p> <p>n. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKN Kendari</p> <p>o. Mengembangkan kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara dengan PKN Kendari</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>p. meningkatkan fungsi PKN Kendari sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>q. meningkatkan fungsi PKN Kendari sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>r. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dan perkebunan dengan PKN Kendari sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Asesolo/Kendari, Kawasan Kapolimu-Patikala Muna-Buton, dan Kawasan Mowedong/ Kolaka yang terhubung dengan Bandar Udara Wolter Mongonsidi</li><li>s. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKN Kendari sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Asera Lasolo, Kawasan Andalan Laut Kapontori Lasalimu dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Tiworo dan Sekitarnya yang terhubung dengan Bandar Udara Wolter Mongonsidi</li><li>t. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kendari untuk mempertahankan luas lahan pertanian</li><li>u. mengendalikan perkembangan PKN Kendari yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</li><li>v. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKN Kendari yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>w. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>x. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKN Kendari</li><li>y. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>z. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Kendari</li></ul>
VI.2.	Unaaha	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Perkebunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Unaaha sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			– Pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>b. mengembangkan PKW Unaaha sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan jagung</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan fungsi PKW Unaaha sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>e. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Unaaha sebagai pusat pengembangan PKW Unaaha sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Asesolo/Kendari</li><li>f. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Unaaha dengan Bandar Udara Kendari</li><li>g. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Unaaha</li><li>h. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Pelayanan Pengumpulan (<i>Feeder</i>) Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW Unaaha</li><li>i. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Lasolo-Sampara</li><li>j. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Unaaha yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>k. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKN Unaaha yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>l. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Unaaha</li><li>m. meningkatkan fungsi PKW Unaaha sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>n. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dan perkebunan dengan PKW Unaaha sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Asesolo/Kendari yang terhubung dengan Bandar Udara Kendari</li><li>o. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>p. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Unaaha</li><li>q. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>r. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Unaaha</li></ul>
VI.3.	Lasolo	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Agroindustri</li><li>- Perkebunan</li><li>- Perikanan</li><li>- Pariwisata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Lasolo sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan dan perkebunan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>c. mengembangkan PKW Lasolo sebagai pusat pariwisata bahari</li><li>d. mengembangkan fungsi PKW Lasolo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>e. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perkebunan serta perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Lasolo sebagai pusat pengembangan(Kawasan Andalan Asesolo/Kendari dan Kawasan Andalan Asesolo/Kendari</li><li>f. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Lasolo dengan Bandar Udara Kendari</li><li>g. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Lasolo</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>h. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Pelayanan Pengumpan (<i>Feeder</i>) Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW Lasolo</li><li>i. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Lasolo-Sampara (Sulawesi Tenggara-Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah)</li><li>j. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Lasolo yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>k. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Lasolo yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>l. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Lasolo</li><li>m. meningkatkan fungsi PKN Gorontalo sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>n. meningkatkan fungsi PKW Lasolo sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>o. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertanian dan perkebunan dengan PKW Lasolo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Asesolo/Kendari yang terhubung dengan Bandar Udara Kendari</li><li>p. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Lasolo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Asesolo/Kendari yang terhubung dengan Bandar Udara Kendari</li><li>q. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>r. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Lasolo</li><li>s. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>t. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Lasolo</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.4.	Bau-bau	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pariwisata</li><li>– Pertambangan</li><li>– Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Bau-Bau sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>c. mengembangkan PKW Bau-Bau sebagai pusat pariwisata bahari serta cagar budaya (Keraton Buton)</li><li>d. mengembangkan PKW Bau-Bau berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir</li><li>e. mengembangkan fungsi PKW Bau-Bau sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>f. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan pertambangan terutama jagung yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Bau-bau sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kopalimu-Patikala Muna-Buton</li><li>g. mengembangkan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Buton di PKW Bau-Bau</li><li>h. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Bau-Bau</li><li>i. mengembangkan prasarana telekomunikasi satelit untuk melayani PKW Bau-Bau</li><li>j. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Pulau Buton</li><li>k. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan PKW Bau-Bau yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>l. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Bau-Bau yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>m. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Bau-Bau</li><li>n. meningkatkan fungsi PKW Bau-Bau sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>o. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan PKW Bau-Bau sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kopalimu-Patikala Muna-Buton yang terhubung dengan jaringan transportasi penyeberangan</li><li>p. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan PKW Bau-Bau sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kopalimu-Patikala Muna-Buton yang terhubung dengan jaringan transportasi penyeberangan</li><li>q. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Bau-Bau yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>r. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>s. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Bau-Bau</li><li>t. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>u. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Bau-Bau</li></ul>
VI.5.	Raha	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Agroindustri</li><li>– Perikanan</li><li>– Pertanian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Raha sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan PKW Raha sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>d. mengembangkan fungsi PKW Raha sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>e. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan dan padat karya di PKW Raha sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Kapantori – Lasalimu dan Sekitarnya</li><li>f. mengembangkan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Muna di PKW Raha</li><li>g. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Raha</li><li>h. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Muna</li><li>i. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan di PKW Raha yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>j. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Raha yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>k. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Raha</li><li>l. meningkatkan fungsi PKW Raha sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li><li>m. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perikanan dengan PKW Raha sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Kapantori – Lasalimu dan Sekitarnya yang terhubung dengan lintas penyeberangan</li><li>n. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Raha yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>o. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>p. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Raha</li><li>q. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>r. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Raha</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.6.	Kolaka	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>– Industri</li><li>– Perkebunan</li><li>– Pertambangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan PKW Kolaka sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan dan pertambangan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu</li><li>c. mengembangkan fungsi PKW Kolaka sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi</li><li>d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulan perkebunan serta pertambangan yang ramah lingkungan dan padat karya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka</li><li>e. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Kolaka dengan Bandar Udara Kendari</li><li>f. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik yang melayani PKW Kolaka</li><li>g. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang menghubungkan Jaringan Terestrial: Feeder Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW Kolaka</li><li>h. mengembangkan prasarana sumber daya air baku berbasis WS Towari-Lasusua</li><li>i. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan PKW Kolaka yang didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan</li><li>j. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Kolaka yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>k. mengembangkan ruang terbuka hijau di PKW Kolaka</li><li>l. meningkatkan fungsi PKW Kolaka sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 62 -

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	JENIS	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>m. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan perkebunan dengan PKW Kolaka sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka yang terhubung dengan Bandar Udara Kendari</li><li>n. meningkatkan keterkaitan pusat kegiatan pertambangan dengan PKW Kolaka sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mowedong/Kolaka yang terhubung dengan Bandar Udara Kendari</li><li>o. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai di PKW Kolaka yang dapat mengganggu fungsi sempadan pantai</li><li>p. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi</li><li>q. menetapkan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi PKW Kolaka</li><li>r. menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kota</li><li>s. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Kolaka</li></ul>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai aslinya



SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Budi Astuti